

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan sejatinya telah diakui secara luas sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global dan menjadi simbol dari praktik bisnis yang etis dan profesional. Secara historis, bank dipandang sebagai institusi yang dapat dipercaya, mengingat perannya yang sentral dalam mengelola dana masyarakat, menyalurkan kredit, dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Ashari & Nugrahanti, 2022). Namun, di tengah perubahan lanskap ekonomi yang semakin cepat dan kompleks, industri perbankan juga menghadapi tantangan baru yang signifikan. Iklim persaingan yang sangat ketat, tuntutan profitabilitas yang tinggi, serta ekspektasi pasar yang terus berkembang dapat mendorong munculnya tekanan internal maupun eksternal yang berpotensi menggeser prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam konteks ini, muncul risiko meningkatnya perilaku tidak etis, termasuk terjadinya praktik *fraud* atau kecurangan.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh ACFE pada tahun 2022, data mengenai kasus *fraud* diklasifikasikan menurut sektor industri. Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa jasa keuangan dan sektor perbankan mencatat jumlah kasus *fraud* tertinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebanyak 351 kasus atau setara dengan 22,30% dari total kasus yang tercatat. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus *Fraud* Berdasarkan Sektor Industri

No.	Industri	Kasus	Persentase Kasus
1.	<i>Banking and financial services</i>	351	22,3%
2.	<i>Government and public administration</i>	198	12,6%
3.	<i>Manufacturing</i>	194	12,3%
4.	<i>Health care</i>	130	8,3%
5.	<i>Energy</i>	97	6,2%
6.	<i>Retail</i>	91	5,8%
7.	<i>Insurance</i>	88	5,6%
8.	<i>Technology</i>	84	5,3%
9.	<i>Transportation and warehousing</i>	82	5,2%
10.	<i>Construction</i>	78	5,0%
11.	<i>Education</i>	69	4,4%
12.	<i>Information</i>	60	3,8%
13.	<i>Food service and hospitality</i>	52	3,3%
<i>Total</i>		1.574	100,0%

Sumber: ACFE Report To The Nations, (ACFE 2022)

Fenomena ini tidak lepas dari karakteristik sektor perbankan dan jasa keuangan yang mengelola arus dana dalam jumlah besar. Hal tersebut menciptakan kerentanan sehingga meningkatkan kemungkinan untuk melakukan berbagai tindak kecurangan, terutama jika sistem pengendalian internal tidak berjalan secara optimal.

Kota Batam sendiri merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang pesat, bahkan mengungguli perkembangan Bank Umum. Seharusnya, menjamurnya BPR di daerah ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI). Terlebih lagi, semakin banyak kredit yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh dan semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai oleh BPR(Natalia, 2019). Dengan lokasinya yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dana, BPR memiliki peranan yang cukup

krusial dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya melalui peningkatan pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dinilai penting, mengingat UMKM selama ini sangat membutuhkan dukungan pendanaan dari pihak eksternal (Prena & Kusmawan, 2020).

Fenomena ditemukan pada BPR Bestari yang beroperasi di Tanjungpinang, di mana Elfin Yudista, mantan Direktur bank tersebut, ditetapkan sebagai tersangka secara resmi dalam kasus korupsi senilai Rp 5,9 miliar. Merujuk pada temuan dalam laporan audit yang diterbitkan oleh BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wilayah Kepulauan Riau, Elfin diduga memberikan kewenangan pencairan dana nasabah kepada pihak lain tanpa melewati prosedur yang ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian negara. Kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan penyalahgunaan wewenang di tingkat manajemen puncak dapat menciptakan celah besar bagi terjadinya korupsi dan penyimpangan internal. (sumber: batampos.co.id, 2024).

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada BPR Bareleng Mandiri (BPR BM) di Kota Batam, yang tengah menghadapi dugaan pelanggaran serius terkait penjualan dua unit kendaraan hasil sitaan. Penjualan aset tersebut dilakukan tanpa transparansi yang memadai, meskipun sebelumnya telah terdapat putusan pengadilan terkait eksekusi atas aset dimaksud. Namun, dalam pelaksanaannya, eksekusi tersebut tidak dapat dijalankan karena ditemukan kejanggalan dalam dokumen transaksi yang menyertainya. Ketidakwajaran dokumen tersebut menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran prosedural dalam pengelolaan

barang sitaan. Hal ini membuka kemungkinan bahwa telah terjadi manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penjualan aset, yang berpotensi mengarah pada tindakan *fraud* dalam lingkup organisasi. Tindakan semacam ini, jika terbukti, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) atau *fraud* berbasis dokumen (*document fraud*), yang merupakan bagian dari *fraud* internal organisasi (Sumber :Antaraneews.com, 2024).

Kota Batam merupakan wilayah strategis di Indonesia yang berkembang pesat sebagai pusat industri, jasa, dan keuangan. Salah satu elemen penting dalam mendukung perekonomian lokal adalah keberadaan Bank Perkonomian Rakyat (BPR), yang melayani pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, BPR juga menghadapi tantangan serius terkait integritas dan pengawasan, terbukti dari beberapa kasus *fraud* seperti yang terjadi di BPR Bestari Tanjung Pinang dan BPR Barelang Mandiri.

Sebelumnya, telah ada penelitian yang menjelaskan bahwa pengendalian internal dan audit internal yang dijalankan sesuai fungsinya akan memengaruhi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sebaliknya, lemahnya pengendalian internal dan audit internal dalam suatu perusahaan merupakan cikal bakal terbukanya peluang terjadinya kecurangan (*fraud*). Selain itu, moralitas individu karyawan yang rendah juga diduga menjadi penyebab tidak langsung terjadinya praktik *fraud*, bahkan ketika lembaga keuangan tersebut telah menerapkan teknologi keuangan, pengendalian internal, dan audit internal yang secara struktural tampak baik (EY Natalia ,wasimanb, & DH Sitorus, 2024).

Maraknya kejadian ini mencerminkan bahwa sektor keuangan memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik kecurangan, yang pada gilirannya menuntut adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang lebih efektif. Dalam konteks ini, niat *whistleblowing* dari karyawan menjadi sangat penting sebagai mekanisme internal untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* sejak dini. Semakin tinggi niat karyawan untuk melaporkan tindakan kecurangan, semakin besar peluang organisasi untuk meminimalisasi kerugian akibat *fraud*. Pada umumnya, pengungkapan atas suatu *fraud* dilakukan secara tertutup dengan itikad baik, serta tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi, niat mencemarkan nama baik, maupun motif fitnah. (Mustopa, Kurniawan & Putri, 2020). Namun demikian, niat baik tersebut hanya dapat diwujudkan jika karyawan merasa lingkungan kerja mereka mendukung dan menyediakan sistem pengawasan yang dapat dipercaya.

Secara umum, perusahaan lebih memilih karyawan untuk melaporkan kesalahan melalui saluran internal daripada eksternal. Hal ini karena *whistleblowing* eksternal dapat menimbulkan dampak negatif, seperti mempermalukan perusahaan di hadapan publik, memicu tindakan hukum, menurunkan kepercayaan terhadap manajemen, mengurangi penjualan, serta berpotensi membocorkan informasi eksklusif. Sebaliknya, pelaporan internal membuat perusahaan menangani kesalahan secara lebih terkendali, sehingga dapat meminimalkan dampak buruk tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menghindari keterlibatan pihak ketiga sepenuhnya (Reshie, Agustin & Helmayunita, 2020).

Beragam faktor dapat memengaruhi kecenderungan karyawan untuk menjadi seorang *whistleblower*, dan salah satu yang krusial adalah tingkat loyalitas atau komitmen individu terhadap organisasi. Karyawan dengan tingkat komitmen yang tinggi umumnya menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi secara maksimal demi kepentingan kolektif organisasi., yang tercermin dalam tindakan dan perilaku mereka, termasuk keberanian untuk mengungkapkan penyimpangan (Putri & Dwita, 2022). Komitmen organisasi yang kuat mendorong individu untuk bertindak bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, melainkan untuk melindungi integritas dan keberlangsungan organisasi. Karyawan dengan komitmen seperti ini tidak mudah gentar menghadapi risiko pembalasan, karena mereka meyakini bahwa mengungkap kecurangan merupakan bentuk loyalitas yang sejati yaitu dengan mencegah kerugian yang lebih besar bagi organisasi, menjaga reputasi, serta memastikan keberlanjutan operasional yang sehat dan etis (Azzahrah & Hadinata, 2021). Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat berdampak pada keinginan individu untuk melakukan *whistleblowing*, yaitu biaya pribadi (*personal cost*). Semakin tinggi risiko pribadi yang mungkin ditanggung seperti kehilangan pekerjaan, pembalasan dari atasan atau rekan kerja, tekanan sosial, atau dampak psikologis maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut bersedia melaporkan kecurangan. Pelapor tidak hanya menghadapi risiko pembalasan dari pelaku kecurangan, tetapi juga berpotensi dianggap melakukan tindakan yang tidak etis oleh lingkungan sosial atau rekan kerja. Dalam beberapa budaya organisasi, tindakan melaporkan rekan kerja sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan, bukan sebagai upaya menjaga integritas. Semakin besar persepsi

terhadap biaya pribadi (*personal cost*) yang mungkin ditanggung, maka semakin kecil juga keinginan individu untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Dengan kata lain, persepsi *personal cost* yang tinggi justru dapat mendorong individu untuk memilih diam, meskipun ia menyadari adanya perilaku kecurangan dalam organisasi (Usman & S Rura, 2021).

Tingkat keseriusan kecurangan juga dapat berdampak signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Konsep ini merujuk pada ukuran seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh kecurangan terhadap organisasi—baik dari aspek keuangan, citra institusi, maupun stabilitas operasional. Ketika kecurangan dianggap berdampak luas dan serius, potensi untuk munculnya tindakan pelaporan oleh karyawan cenderung meningkat. Tingkat keseriusan kecurangan merujuk pada sejauh mana suatu tindakan kecurangan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi. Pelanggaran yang bersifat serius biasanya ditandai dengan potensi kerugian yang besar, ancaman terhadap keberlanjutan usaha, rusaknya reputasi perusahaan, hingga kemungkinan sanksi hukum. Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat keseriusan pelanggaran, maka semakin besar pula dorongan moral dan rasa tanggung jawab pegawai untuk mengungkapkan kecurangan tersebut melalui tindakan *whistleblowing*. Pegawai yang menyadari bahwa pelanggaran tersebut dapat membahayakan organisasi dalam jangka panjang cenderung memiliki niat lebih kuat untuk bertindak, demi mencegah kerugian yang lebih besar (Saputra, Eliza, & Sari 2021).

Berdasarkan temuan empiris sebelumnya, beberapa penelitian (Afifah & Zarefar, 2021; Hamidah, Rizani, & Safrida, 2022; Tanor & Zega, 2024) menyatakan bahwa hubungan positif dan signifikan muncul antara tingkat komitmen organisasi dengan niat individu untuk melaporkan pelanggaran. Karyawan yang menunjukkan loyalitas tinggi terhadap institusi tempatnya bekerja cenderung terdorong untuk mengungkap tindakan kecurangan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan organisasi dan upaya mencegah kerugian yang mungkin timbul. Meskipun demikian, hasil berbeda ditemukan dalam studi lain (Mustopa et al., 2020; Putri & Dwita, 2022), yang di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan antara loyalitas karyawan terhadap institusi dan kecenderungan untuk menyampaikan laporan pelanggaran tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.

Personal cost juga dinilai sebagai salah satu faktor yang seringkali mendapat perhatian dalam berbagai penelitian. Berdasarkan temuan dari (Alwi and Helmayunita 2020; Mustopa et al. 2020), *personal cost* menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap dorongan individu dalam menyuarakan pelanggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar risiko pribadi yang dirasakan oleh karyawan seperti kehilangan pekerjaan, dikucilkan secara sosial, atau mendapat perlakuan tidak adil maka semakin rendah pula kecenderungan mereka untuk melaporkan kecurangan. Namun, perbedaan hasil ditemukan pada penelitian (Reshie et al. 2020) yang mengatakan bahwa *personal cost* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Sejumlah studi telah mengeksplorasi sejauh mana tingkat keseriusan suatu kecurangan berkorelasi dengan kecenderungan individu dalam menyampaikan laporan pelanggaran. Studi yang dilakukan oleh Alwi dan Helmayunita (2020), Liani dan Helmayunita (2024), serta Mustopa *et al.* (2020) menemukan bahwa semakin serius dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kecurangan, baik dari segi kerugian finansial, implikasi hukum, maupun reputasi organisasi, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk melaporkannya. Temuan ini mengindikasikan adanya dorongan moral dan rasa tanggung jawab yang mendorong individu bertindak demi menjaga keberlangsungan organisasi. Sebaliknya, temuan dari Sartika dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa tingkat keparahan kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan dengan kecenderungan individu dalam melaporkan pelanggaran.

Ketidak konsistenan terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya menjadi hal yang penting bagi peneliti karena menunjukkan adanya celah riset yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. Perbedaan hasil tersebut menandakan bahwa hubungan antara variabel- variabel seperti komitmen organisasi, *personal cost*, dan keseriusan kecurangan terhadap niat *whistleblowing* tidak bersifat tetap pengaruhnya sehingga perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan komitmen organisasi, *personal cost*, dan keseriusan kecurangan secara bersama-sama. Selain itu, objek kajian yang difokuskan adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ada di Batam sebuah wilayah dengan perkembangan ekonomi dan industri yang pesat.

Berdasarkan permasalahan yang dielaborasi pada bagian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah topik penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, *Personal cost* dan Keseriusan Kecurangan terhadap Niat *Whistleblowing*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian dalam bagian pendahuluan, fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sektor perbankan dan jasa keuangan mencatat jumlah kasus *fraud* tertinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebanyak 351 kasus atau setara dengan 22,30% dari total kasus yang tercatat.
- b. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam tengah menghadapi dugaan pelanggaran serius terkait penjualan dua unit kendaraan hasil sitaan, yang memunculkan potensi atau dorongan bagi karyawan untuk melakukan *whistleblowing*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini memilih fokus masalah pada aspek-aspek tertentu guna mengoptimalkan penggunaan waktu serta menjaga konsentrasi pada topik yang sedang diteliti. Adapun batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan pada Bank Perekonomian Rakyat yang beroperasi di wilayah Kota Batam.
- b. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah niat untuk melakukan *whistleblowing* oleh karyawan yang bekerja di Bank

Perekonomian Rakyat yang berlokasi di Kota Batam.

- c. Variabel bebas (independen) yang digunakan pada penelitian ini mencakup komitmen organisasi, *personal cost* serta tingkat keseriusan kecurangan.
- d. Periode penelitian dimulai April sampai Juni 2025.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan utama yang hendak dijawab melalui proses penelitian ini:

- a. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap niat *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam?
- b. Bagaimana pengaruh *personal cost* terhadap niat *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam?
- c. Bagaimana pengaruh keseriusan kecurangan terhadap niat *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam?
- d. Bagaimana pengaruh secara simultan komitmen organisasi, *personal cost*, dan keseriusan kecurangan terhadap niat *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam.

- b. Menganalisis pengaruh *personal cost* terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam.
- c. Mengkaji pengaruh keseriusan kecurangan terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam.
- d. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi, *personal cost*, dan keseriusan kecurangan secara simultan terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi tambahan pada perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang perilaku organisasi terkait *whistleblowing*.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan di lembaga keuangan, khususnya BPR.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem *whistleblowing* demi mencegah *fraud* dan meningkatkan tata kelola yang

baik.

b. Bagi Karyawan

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai pentingnya *whistleblowing* serta memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul, sehingga mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.